

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keuangan Daerah memerlukan pengelolaan yang dilakukan secara tertib berdasar pada UU 33 Tahun 2004. Sehingga dalam kegiatannya, pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan melalui pelaporan keuangan yang berkualitas. Pelaporan Keuangan sendiri ialah catatan informasi suatu entitas dimana saat ini menjadi sebuah kewajiban tersendiri bagi setiap instansi maupun lembaga untuk terus menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, baik dan terhindar dari KKN sehingga menjadikan dorongan yang kuat untuk setiap instansi guna melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Namun pada kenyataannya, masih didapati pelaporan keuangan yang memiliki segudang masalah dibalik fungsinya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat yang dimana memiliki kedaulatan dan kekuasaan tertinggi didalam negara demokrasi kini.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menerangkan bahwa pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dimana merupakan sebuah perjalanan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan yang sangat penting apabila dalam penyelenggaraannya mampu terwujud penguatan fungsi serta kebermanfaatan pelaporan keuangan yang maksimal.

Pentingnya penyajian pelaporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban setiap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam pemerintahan mendorong upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memaksimalkan sarana prasarana serta teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan maupun program. Hal ini juga tak luput pada penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Sehingga upaya untuk mencapai pelaporan keuangan yang berfungsi guna memberikan informasi keuangan, prediksi kondisi keuangan, memberikan informasi perencanaan dan penganggaran serta mengevaluasi kinerja secara maksimal dapat dilakukan melalui konsep kualitas pelaporan keuangan yang selanjutnya sebuah instansi dapat terhindar dari terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, risiko keputusan yang diambil kurang berkualitas, dan tata kelola pemerintahan yang buruk.

Kecamatan yang dalam proses pembentukannya sebagaimana disebut dalam PP nomor 17 tahun 2018 yaitu di dalam rangka kepentingan strategis nasional diselenggarakannya urusan pemerintahan secara umum tingkat kecamatan yang sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwasannya pemerintahan kecamatan juga memiliki peran yang sangat penting dalam ragam aspek kehidupan masyarakat. Sehingga program serta sasaran pemerintahan kecamatan seringkali lebih condong kepada pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat.

Data yang peneliti temukan setidaknya terdapat 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yang masih memiliki permasalahan terkait dengan bencana

banjir pada tahun 2019 yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan serta program yang telah direncanakan oleh masing-masing kecamatan. Yaitu diantaranya Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Banjaran dan juga Kecamatan Ciparay.

Namun demikian berdasarkan temuan observasi dikatakan bahwasannya terdapat 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yang dianggap masih serumpun dan memiliki tingkat keparahan yang cukup tinggi ketika terjadi banjir diakibatkan meluapnya Sungai Citarum diantaranya yaitu Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Baleendah. Data BNPB menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 10 kali bencana banjir pada tahun 2019 yang terjadi di wilayah sekitaran sungai citarum diantaranya ialah Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Baleendah. Dampak dari intensitas curah hujan tinggi tersebut yang mengakibatkan meluapnya Sungai Citarum dan kemudian terjadi banjir sehingga dapat mengakibatkan lumpuhnya akses jalan yang kemudian berujung dengan kemacetan, menenggelamkan rumah warga sehingga diharuskan untuk mengungsi, terganggunya aktivitas warga, gagalnya pelaksanaan kegiatan, serta kerugian lain salah satunya ialah menjadi penyebab keterlambatan dalam menyajikan pelaporan keuangan dan melakukan publikasi pelaporan keuangan seperti yang terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung mempunyai visi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersinergi dengan pembangunan perdesaan dengan suatu landasan

kultural, berwawasan lingkungan dan religius. Namun dalam menyelenggarakan programnya, Kecamatan Dayeuhkolot dihadapkan pada beberapa permasalahan serta hambatan dalam menjalankan pemerintahan.

Dibandingkan dengan Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Baleendah yang sama-sama memiliki permasalahan banjir dilingkungannya, hasil temuan observasi mengatakan fakta bahwa Kecamatan Dayeuhkolot memiliki capaian akuntabilitas yang lebih rendah daripada Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Baleendah. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1 Perbandingan Nilai Akuntabilitas 3 Kecamatan Kabupaten Bandung**

No	Kecamatan	Nilai Akuntabilitas		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dayeuhkolot	60,01	56,54	94,2%
2	Bojongsoang	60,49	63,05	104,23%
3	Baleendah	55	67,21	122,2%

Kecamatan Dayeuhkolot dalam LKIP 2019 disebutkan bahwa bencana banjir ini berpengaruh buruk terhadap penyelenggaraan program dan kegiatannya, belum lagi permasalahan kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, serta prasarana penunjang kegiatan yang masih kurang sehingga dalam menyajikan pelaporan keuangan masih didapati kesalahan input pada pelaporan keuangan yang disajikan oleh Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Hambatan ketidaksesuaian pula dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan juga berdampak pada tidak tercapainya target nilai pertanggungjawaban yang telah ditentukan pada

tahun sebelumnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan instansi terkait. Hal ini dibuktikan dengan berdasar pada temuan observasi sebagai berikut:

**Tabel 2 Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2018-2019**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pendapatan aset daerah	Nilai akuntabilitas kecamatan dayeuhkolot	56,54 (CC)	55,58 (C)	60.01 (B)	56,54 (CC)
		Persentase BMD/aset dalam kondisi baik	90%	70%	90%	79%

Data yang peneliti peroleh dari tabel diatas, beberapa program serta kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal hal ini pula tercermin dari capaian kinerja kesesuaian program Kecamatan Dayeuhkolot hanya mencapai 89,25% dari 100% pada tahun 2019 dimana masih jauh dibawah dari target yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan tidak maksimalnya kebermanfaatan pelaporan keuangan daerah dalam memberikan umpan balik pada rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang..

Menurut temuan diatas pula, berikutnya yang telah peneliti telaah berdasarkan observasi yang dilakukan ialah masih didapati keterlambatan dalam melakukan penyajian maupun publikasi pelaporan keuangan yang beberapa kali terjadi dikarenakan bencana banjir, Kurangnya kebermanfaatan pelaporan keuangan daerah dalam memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan juga masih didapati kesalahan input pada pelaporan

keuangan, sehingga permasalahan pada pelaporan keuangan yang disajikan tersebut yang menjadikan alasan peneliti memilih Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung sebagai objek daripada penelitian berkaitan dengan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Permasalahan yang ditemukan pada saat observasi dilakukan juga tentunya perlu diteliti lebih lanjut mengenai Kecamatan Dayeuhkolot ini, pasalnya hal ini juga sebagai acuan membandingkan situasi maupun keadaan daripada kebermanfaatan Pelaporan Keuangan yang berkualitas dengan yang terjadi di Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Baleendah yang juga merupakan zona wilayah rawan banjir.

Hal diatas tersebut menjelaskan bahwasannya kendati Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Baleendah berada pada kawasan rawan banjir, namun Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Baleendah dapat menjalankan programnya sehingga mencapai target bahkan melebihinya sedangkan tidak dengan Kecamatan Dayeuhkolot.

Beberapa hambatan serta permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya juga semakin menjelaskan bahwasannya Kecamatan Dayeuhkolot dalam melaksanakan kinerjanya belum maksimal termasuk pada belum dapat terpenuhinya nilai pertanggungjawaban kepada masyarakat juga memiliki beberapa permasalahan terkait pelaksanaan penyajian pelaporan keuangan daerah sehingga belum mencapai kualitas yang dikehendaki.

Pentingnya bagaimana kualitas pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para penguasa di pusat maupun daerah

mendorong peneliti untuk selanjutnya meneruskan konsentrasi keilmuan Adminisrasi Publik pada fokus keuangan publik mengenai kualitas pelaporan keuangan daerah sehingga penulis akhirnya tertarik untuk selanjutnya melakukan sebuah penelitian dengan judul **“KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KECAMATAN DAYEUEHKOLOT KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dilihat dari data yang telah diperoleh dari Kecamatan Dayeuhkolot Kab.Bandung, maka penulis melakukan pembatasan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. .Masih didapati keterlambatan dalam melakukan penyajian serta publikasi pelaporan keuangan untuk kebutuhan publik pada Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
2. Kurangnya kebermanfaatan pelaporan keuangan daerah dalam memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
3. Masih terjadi kesalahan input pada pelaporan keuangan yang disajikan oleh Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek Relevan pada pelaporan keuangan daerah yang disajikan oleh Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana aspek Andal pada pelaporan keuangan daerah yang sajikan oleh Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung?
3. Apakah pelaporan keuangan daerah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dapat dibandingkan dalam penyajiannya?
4. Apakah pelaporan keuangan daerah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dapat dipahami dalam penyajiannya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui aspek Relevan dalam pelaporan keuangan daerah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui aspek Andal dalam pelaporan keuangan daerah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui aspek Dapat dibandingkan dalam pelaporan keuangan daerah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung..
4. Mengetahui aspek Dapat dipahami dalam pelaporan keuangan daerah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak



baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih mendalam bagi peneliti khususnya dalam bidang administrasi publik untuk mengkaji dan menganalisis tentang Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan kelas dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Bagi Instansi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan masukan bagi Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah.

- c. Bagi peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai referensi dengan bidang yang sama secara mendalam.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pelaporan keuangan adalah suatu proses dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah oleh suatu entitas pelaporan selaku hasil dari penggabungan atas laporan keuangan sebagai entitas akuntansi. Pelaporan keuangan adalah proses penyampaian informasi keuangan yang mencakup beragam aspek yang ada keterkaitan dengan kegiatan menyusun, mempertanggungjawabkan, menyampaikan, menggunakan, menyalurkan dan membagikan serta melakukan penyimpanan terhadap laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat dalam pelaporan keuangan daerah di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung mengenai kualitas nya dinilai belum maksimal, hal ini dikarenakan dalam proses penyajiannya masih ditemukan keterlambatan dalam melakukan publikasi pelaporan keuangan, konsistensi perencanaan dan penganggaran belum stabil dan masih terjadi kesalahan input pada pelaporan keuangan

Dari pernyataan diatas, berbicara mengenai pelaporan keuangan tentu tidak terlepas dari kualitas pelaporan keuangan daerah pada sebuah instansi maka perlu dilakukan landasan pelaksanaan daripada penyajian pelaporan keuangan daerah yang berkualitas sehingga mampu memberikan kebermanfaatan pada pelaksanaan perencanaan keuangan hingga melakukan evaluasi serta perbaikan pada kinerja instansi terkait.

Sehingga dalam pembahasan serta pemecahan masalah daripada penelitian ini, peneliti membutuhkan landasan teori yang memiliki tujuan guna mengetahui teori-teori yang akan digunakan memiliki korelasi serta relevansi dengan variabel

yang terdapat pada judul penelitian. Adapun landasan teori yang penulis anggap relevan untuk menggambarkan kualitas pelaporan keuangan daerah di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019 yaitu menggunakan teori kualitas pelaporan keuangan daerah dari Mahmudi.

Menurut Mahmudi, Pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan tentunya diharuskan untuk selalu melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikannya. Sehingga laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dapat meraih nilai yang berkualitas jika memenuhi ciri-ciri berikut :

1. Relevan. Yang berarti informasi dalam laporan keuangan mesti disajikan dengan memberi kebermanfaatan bagi para pengguna laporan keuangan guna melakukan pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan berkaitan erat dengan:
  - a. Laporan keuangan mampu memberi manfaat guna memperkirakan (*predictive value*), yaitu memberi prediksi kondisi, kebutuhan keuangan, dan kinerja pada masa yang akan datang.
  - b. Laporan keuangan mampu memberikan manfaat guna mengevaluasi kinerja di masa sebelumnya sehingga memberikan umpan balik pada rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang (*feedback value*).
  - c. Laporan keuangan diterbitkan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan dalam artian tidak terlambat (*timeliness*).
2. Andal (*Realibility*). Maksudnya ialah informasi yang disajikan harus mampu

diandalkan, tidak keliru ataupun salah dan mengandung unsur penipuan.

Laporan keuangan yang andal mempunyai ciri diantaranya:

- a. Penyajiannya jujur (*faithfulness of presentation*), ialah laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak mengandung tipu daya.
  - b. Mampu diverifikasi (*verifiability*), ialah informasi dalam laporan keuangan mampu dikonfirmasi kebenarannya melalui proses audit.
  - c. Netral dalam menyajikan (*neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat memihak terhadap kepentingan suatu kelompok tertentu.
3. Dapat dibandingkan (*comparability*). ialah laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembeda kinerja yang lalu atau kinerja organisasi lain yang serupa.
  4. Dapat dipahami (*understandability*). ialah laporan keuangan mesti memberikan informasi yang sederhana, jelas serta ringan sehingga mudah dipahami oleh pihak para pengguna laporan keuangan.

Alasan peneliti menggunakan teori ini karena teori ini relevan dengan perumusan masalah yang telah diteliti dan pelaporan keuangan daerah juga merupakan bagian dari administrasi publik dengan fokus keuangan publik.. Dengan menggunakan teori ini maka pelaporan keuangan daerah daripada yang telah disajikan oleh sebuah instansi maupun pemerintah daerah dapat dinilai berkualitas dan menghasilkan kebermanfaatannya informasi keuangan yang maksimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaporan keuangan. Diharapkan teori ini mampu menakar kualitas pelaporan keuangan yakni Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019. Atas paparan tersebut maka dapat diperjelas dengan

sebuah bagan kerangka pemikiran didalam penelitian sebagai berikut :

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

